

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

ASEAN secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kawasan ASEAN sendiri merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dalam perekonomian global karena kawasan ASEAN memiliki potensi kemakmuran ekonomi yang tinggi didukung oleh sumber daya alam dan manusia yang baik. Secara umum, kawasan ini telah ditetapkan sebagai barometer stabilitas keamanan dan politik di kawasan Asia-Pasifik (Kamanda, 2013) (Kotarba et al., 2014) (Lu, Y, (2010).

Sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Selain sumber daya alamnya, Indonesia didukung oleh sumber daya manusia yang banyak, stabilitas politik dan keamanan, serta didukung oleh sosial budaya yang harmonis menjadikan Indonesia salah satu prioritas investor ketika berinvestasi di berbagai sektor ekonomi (Hossain, 2001). (Gherghina, 2013) (Epaphra, 2018). Pertumbuhan ekonomi suatu negara saat ini diukur sebagai ukuran keberhasilan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu negara (Todaro, 2005). Menurut teori pertumbuhan endogen, investasi dalam modal fisik dan manusia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari perubahan produksi nasional. Perubahan output nasional dapat diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Di Indonesia, antara lain, administrasi publik telah memainkan peran penting dalam sejarah ekonomi. Sektor pemerintah Indonesia memiliki peran tersendiri dalam melaksanakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan utama berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat, pengurangan pengangguran dan pengendalian inflasi. Dua alat kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mendorong perekonomian adalah perpajakan dan pengeluaran (Mustanir & Jabbar, 2019).

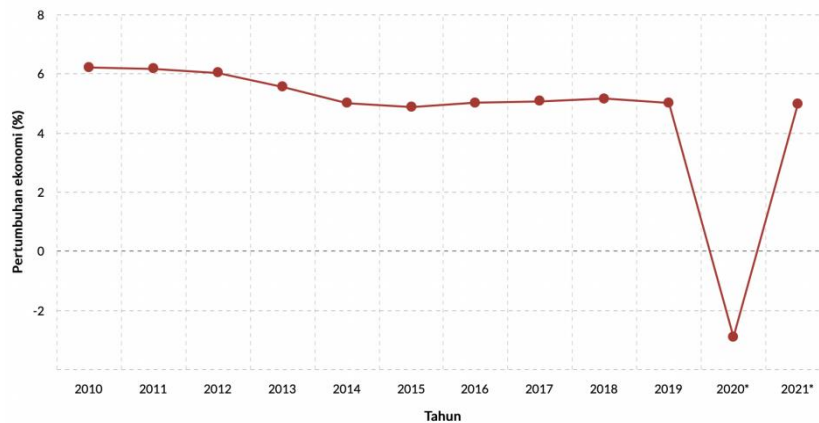
Menurut Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian:

(1) pemeliharaan keamanan dan pertahanan dalam negeri; (2) administrasi peradilan; dan (3) penyediaan produk yang tidak disediakan oleh swasta, seperti B.

Infrastruktur dan fasilitas umum. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, dan cara pelaksanaan anggaran tersebut adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengacu pada ukuran, pertumbuhan, dan struktur anggaran pemerintah suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan komponen pendapatan nasional, baik finansial maupun non finansial (Hollis, J, 2019) (Kerr et al, 2011). Pertumbuhan belanja konsumen didorong oleh pendapatan nasional yang ditentukan oleh produktivitas sumber daya manusia terkait kualitas pendidikan, kesehatan dan keterampilan (Tombe et al, 2019)

Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow dan Swan (1956), peran negara tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dalam hal pengeluaran atau pajak (Kneller et al., 1999). Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh pengaruhnya terhadap perubahan konsumsi atau investasi publik dan penerimaan pajak. Kelompok teori ini juga menganggap keberadaan infrastruktur, peraturan perundang-undangan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan basis pertukaran internasional sebagai faktor penting yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah sebagai intervensi nyata pemerintah dalam perekonomian telah menjadi topik penelitian yang penting. Sebuah studi di negara-negara Asia termasuk Cheng (1997) dengan menggunakan pendekatan Cheng Vector Autoregressive (VAR) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Singh dan Sahni (1984) dan Ram (1986) menemukan penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ada juga penelitian yang menunjukkan pentingnya hubungan antara kedua variabel tersebut, namun pola hubungannya cenderung negatif. Penelitian ini antara lain dilakukan oleh Landau (1986) dan Russek (1990).

Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010-2021



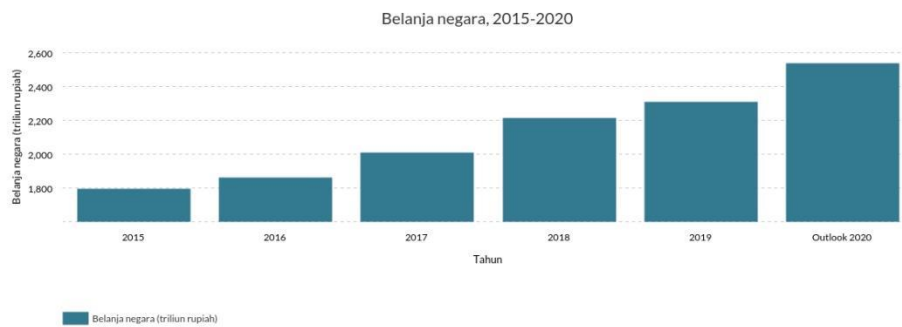
Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada tahun 2020 keadaan perekonomian Indonesia melemah dan berada di angka -2,9%, namun mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai meningkat pada kisaran pertumbuhan 5%. Variabel-variabel berikut ini antara lain dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara: Produk Domestik Bruto, Pengangguran dan Inflasi (Samuelson, 1996).

Sebaliknya, umumnya pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai produk domestik bruto (PDB), dengan menggunakan gagasan pendapatan nasional. PDB biasanya diartikan sebagai nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama periode tertentu (biasanya satu tahun).

Pada akhir tahun 1990-an, beberapa negara ASEAN mengalami krisis keuangan yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia, khususnya Indonesia. Berdasarkan data produk domestik bruto Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia memburuk hingga 13,6% pada tahun 1998, dan antara tahun 2000 dan 2004 Indonesia mulai memperbaiki keadaan ekonomi negaranya, keluar dari level negara-negara tersebut. . berpenghasilan rendah dan mencapai tingkat negara berkembang berpenghasilan menengah. Setelah tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dan PDB 6 persen per tahun. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar dan menjadikan konsumsi dalam negeri berkelanjutan. Meski harga berbagai barang turun drastis, nilai pasar saham mulai merosot, begitu pula dengan jatuhnya nilai tukar. Menurut Todaro (1994),

pertumbuhan ekonomi memiliki tiga komponen yang penting bagi setiap masyarakat, termasuk akumulasi modal, yang mencakup setiap investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan profesional. Pertumbuhan penduduk pada akhirnya menyebabkan peningkatan angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja. Dan kemajuan teknologi yang dapat mempermudah proses produksi sebagai bagian dari efisiensi tenaga kerja.

Gambar 1. 1 Pengeluaran Pemerintah tahun 2015-2020



Berdasarkan grafik di atas, Pengeluaran Pemerintah meningkat sangat drastis setiap tahunnya dan jika digabungkan dengan Gambar 1.1, Pengeluaran Pemerintah terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi dimana Pengeluaran Pemerintah mencapai Rs 2.500 Triliun pada tahun 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar -2,0,9%.

Sebagai instrumen penting dari kebijakan fiskal, belanja publik harus mampu mendorong perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Negara mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (share) dalam produk domestik bruto (PDB). Belanja publik juga tumbuh secara riil dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Tabel 1. 1 Perkembangan PDB Indonesia tahun 2010-2018

Perkembangan PDB Indonesia Tahun 2010-2018			
Tahun	PDB (Miliar Rupiah)	Kenaikan PDB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan PDB (%)
2011	7.286.915	422.782	6,16
2012	7.735.785	448.870	6,16
2013	8.177.822	442.037	5,71
2014	8.603.636	425.814	5,21
2015	9.033.169	429.533	4,99
2016	9.498.833	465.664	5,16
2017	9.995.625	496.792	5,23
2018	10.526.756	531.131	5,31

Sumber: BPS, 2018.

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa PDB tumbuh antara tahun 2011 dan 2018, namun tidak beraturan. Jika pertumbuhan PDB tidak stabil dari tahun ke tahun, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan kecil pada produk yang dihasilkan. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa penambahan lapangan kerja tidak akan cukup untuk mengatasi peningkatan angkatan kerja, sehingga sulit untuk mengurangi tingkat pengangguran. PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain investasi, lapangan kerja dan pendidikan. Peran negara dalam perekonomian tercermin dari porsi belanja sektor komersial terhadap total belanja yang cenderung meningkat. Pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan sumber daya yang berkualitas juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sumber daya alam dan manusia harus membentuk produk domestik bruto yang baik. Investasi sumber daya manusia sangat penting, apalagi di daerah Indonesia yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk mengadopsi teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produktif dan berkelanjutan (Todaro, 2006). Sekaligus dapat dilakukan upaya untuk mengukur kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya dengan melihat rata-rata waktu belajar (RLS). Data angkatan

kerja di atas 15 tahun dan rata-rata lama pendidikan di Indonesia disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Tenaga Kerja dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia Tahun 2008-2018

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Bekerja (orang)	Pengangguran (orang)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)
2008	111.947.265	102.552.750	9.394.515	7,5
2009	113.833.280	104.870.663	8.962.617	7,9
2010	116.527.546	108.207.767	8.319.779	7,46
2011	116.097.701	107.416.309	8.681.392	7,52
2012	119.849.734	112.504.868	7.344.866	7,59
2013	120.172.003	112.761.072	7.410.931	7,61
2014	121.872.931	114.628.026	7.244.905	7,73
2015	122.380.021	114.819.199	7.560.822	7,78
2016	125.443.748	118.411.973	7.031.775	7,95
2017	128.062.746	121.022.423	7.040.323	8,10
2018	131.005.641	124.004.950	7.000.691	8,17

Sumber: BPS, 2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja semakin meningkat dari tahun 2008-2018 dan jumlah orang yang bekerja mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya, akan tetapi tingkat pengangguran juga masih tinggi. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan variabel lainnya (defisit anggaran, inflasi, nilai pasar saham dan labor) terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan?
2. Apakah inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan?
3. Apakah nilai pasar saham dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Apakah jumlah Labor/Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui jumlah Labor/Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

D. BATASAN PENELITIAN

1. Hanya membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Hanya membahas dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3. Hanya membahas pengaruh nilai pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Hanya membahas pengaruh jumlah labor/ tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menyusun arah atau kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga dapat memberikan pengetahuan mengenai inflasi dan nilai jual pasar saham.
2. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau memberikan sumbangan pemikiran atau mengetahui teori-teori terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan determinan dan prospeknya dan diharapkan menjadi acuan dalam oleh penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian tentang topik yang sama.
3. Untuk penulis, untuk melengkapi program perkuliahan S1, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Amad Dahlan.